

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Aristasius Sugiya, Sintha Ratnawati (ed), 2016, *Buku Pintar Kompas 2015*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Bestian Nainggolan (ed), Yohan Wahyu (ed), 2016, *Partai Politik Indonesia 1999-2019 Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Cornelis Lay, 2010, *Melawan Negara PDI 1973-1986*, *Research Center for Politics and Government* Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Deliar Noer, 2000, *Partai Islam Di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*.
- Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang.
- Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Fernita Darwis, 2011, *Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu 2009*, Alfabeta, Bandung.
- George Towar Iqbal Tawakkal, 2009, *Peran Partai Politik Dalam Mobilisasi Pemilih*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Politik, Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Huala Adolf, 2003, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT Raja Grafind, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, Dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2013 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muchamad Ali Safa'at, 2011, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik Di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ramlan Subakti, 1992, *Memahami Ilmu politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Rita Trisna Budiarti, Miftakhul Huda (Ed), 2013, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pemilu*, Jakarta.
- R. Wiyono, 2008, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Agustus, Jakarta.
- Sahya Anggara, 2013, *Sistem Politik Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Sjachran Basah, 1981, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sukarna, 1981, *Sistem Politik*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Tarmudi, 2013, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Widodo Ekatjahjana, 2008, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Peradilannya di Indonesia*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Wirawan, 2011, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*, Salemba Empat, Jakarta.
- Winardi, 2007, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal dan Artikel

Chudry Sitompul, 2010, "Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multi Partai". Pada tanggal 30 September 2015.

CSIS: "Peran Masyarakat dan Demokrasi Lokal", Jakarta, Vol.34, No.2. April 2005.

Debora Sanur L, "Manajemen Konflik Partai Politik", Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2015, *Pemerintahan Dalam Negeri*.

Edo Media, "Dualisme Parpol Tinjauan Dari Sisi Hukum", Kompasiana.com, 28 Maret 2015. http://www.kompasiana.com/edomedia/dualisme-parpol-tinjauan-dari-sisi-hukum_551ffd39813311ea719de10d

Farchan Bulkin (ed), 1991, "Analisa Kekuatan Politik di Indonesia", LP3ES, Jakarta.

Hado Santoso, "Sejarah Konflik PKB antara Muhaimin Iskandar dan Gus Dur", *Persda*: 26 Maret 2008.

Imam Budilaksono, Selasa 24 Februari 2015, "Pengadilan Tolak Gugatan Golkar Kubu Aburizal Bakrie". <http://www.antaranews.com/berita/481715/pengadilan-tolak-gugatan-golkar-kubu-aburizal-bakrie>.

Insan Fahmi Siregar, "Partai Masjumi: Pembentukan, Perkembangan, dan Pembubarannya 1945-1960, Tesis di Universitas Indonesia.

Joko Sadewo, Kamis, 16 Oktober 2014, "Ini Kronologi Mahkamah PPP Menyelesaikan Konflik Internal", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/16/ndj4xb-ini-kronologi-mahkamah-ppp-menyelesaikan-konflik-internal>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/urus>.

Khairul Fahmi, "Mahkamah Partai Politik", Majalah *GeoTIME*, 30 Maret 2015.

Kompas, Kamis 22 Oktober 2015, "Pengurus Daerah Mulai Konsolidasi: Kedua Kubu DPP Partai Golkar Menunggu Putusan Mahkamah".

Kompas, Rabu 21 Oktober 2015, "Saatnya Lakukan Rekonsiliasi: MA Putuskan Sengketa Partai Golkar dan PPP".

Laksono Hari Wowoho (Ed), "Pragmatisme di Balik Konflik Internal Parpol", *Harian Kompas*, Senin, 29 Agustus 2016. <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/16/15000071/Pragmatisme.di.Balik.Konflik.Internal.Parpol?page=all>

Meri Yarni, (tth.), "Undang-Undang Parpol Dalam Perubahan Paradigma Pelaksanaan Fungsi Parpol Guna Mengukur Perpolitikan", (ttp.).

Muhtar Haboddin, "Konflik Partai: Perbandingan antara PKB dan PDIP", *Jurnal governance*, Vol.1, No.2, Mei 2011.

Noor Ishak, 2009, "Pergerakan Partai Masyumi Di Indonesia 1945-1960", Skripsi di Fakultas Ushuluddin dan Filasafat UIN Syarifhidayatullah.

Refly Harun, Sengkarut Konflik Parpol, Rabu 1 April 2015, dalam website Kementerian Sekretariat Negara republik Indonesia.

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8943.

_____, Sengkarut Konflik Parpol, dalam Kolom detik.com, Selasa 24 Maret 2015, <http://news.detik.com/read/2015/03/24/095111/2867732/103/1/sengkarut-konflik-parpol>.

RFQ/FAT, Kamis, 12 Maret 2015, "Soal Konflik Golkar, Menkumham Pastikan Keputusannya Berdasarkan UU: Yakni Pasal 32 UU Tentang Partai Politik. Menkumham Dinilai Menafsirkan Sepihak Pasal 33 UU Parpol. <http://geotimes.co.id/mahkamah-partai-politik-2/>.

2014. Syamsuddin Haris, "Mengelola Konflik Partai Politik", 29 Desember

Tim Prima Pena, *Tempo.Co*, Minggu, 15 Maret 2016, "Konflik Golkar dan PPP, Ini Bedanya". <https://m.tempoco.com/read/news/2015/03/15/078650029/konflik-golkar-dan-ppp-ini-bedanya> tanggal 12 Mei 2016.

Ummy Kulsum,dkk, "Dinamika Politik PKB (Studi tentang Konflik Internal 1999-2004)", Volume I, 1-10 Agustus, 2013, *Mata Budaya*.

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia.

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2008/07/26/23835/Nasib-PKB-setelah-Kasasi-MA>.

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/10/06/20/120715-pks-nyatakan-terbuka-menerima-kader-non-muslim>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

D. Risalah, Putusan dan Arsip

Risalah Sidang Perkara Nomor 78/PUU-XIII/2015 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Arsip Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014-2019.

E. Wawancara

Marcin Walecki , *A graduate of Oxford University. The Chief of the Democratic Governance and Gender Unit at the OSCE ODIHR. Marcin has worked on anti-corruption and political finance, political party assistance in some 40 countries.*

Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar VIII pada Sabtu, 9 April 2016 di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta.

